

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI
(Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar
Kabupaten Tapanuli Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

HERTIANI SIMANJUNTAK

208520041



**PROGRAM STUDI ILMU AMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI
(Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar
Kabupaten Tapanuli Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH :

HERTIANI SIMANJUNTAK

208520041

**PROGRAM STUDI ILMU AMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I
Kecamatan Sipahutar kabupaten Tapanuli Utara)

Nama : Hertiani Simanjuntak

NPM : 208520041

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus: 07 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS/UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hertiani Simanjuntak
NPM : 208520041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir, skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 April 2024


Hertiani Simanjuntak
208520041

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu “pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik”. Penelitian ini dilatar belakangi masalah yaitu peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap petani nenas yang ada di Sipahutar tidak dijalankan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori labolo dengan 3 indikator yaitu: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan pemerintah desa di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara pada indikator regulator dan fasilitator sudah berjalan dengan baik, namun peran pemerintah sebagai dinamisator masih belum baik dilaksanakan.

Kata Kunci : Peran. Pemberdayaan, Kelompok Tani

ABSTRACT

The Republic of Indonesia Law No. 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers states that "farmer empowerment is any effort to improve the farmers' ability to carry out better farming." This research was motivated by the issue that the role of Agricultural Extension Workers (PPL) towards pineapple farmers in Sipahutar is not being properly implemented. This study used Labolo's theory with three indicators: regulator, dynamizer, and facilitator. The purpose of this research was to understand the role of the village government in empowering farmer groups in Sabungan Nihuta I Village, Sipahutar District, North Tapanuli Regency, and to identify the factors that hindered the empowerment of farmer groups by the village government in Sabungan Nihuta I Village, Sipahutar District, North Tapanuli Regency. This research used a descriptive qualitative approach. Data were analyzed through observation, interviews, and documentation techniques. The results showed that the role of the village government in empowering farmer groups in Sabungan Nihuta I Village, Sipahutar District, North Tapanuli Regency was well executed in the regulator and facilitator indicators, but the government's role as a dynamizer was still not well implemented.

Keywords: Role; Empowerment; Farmer Groups.

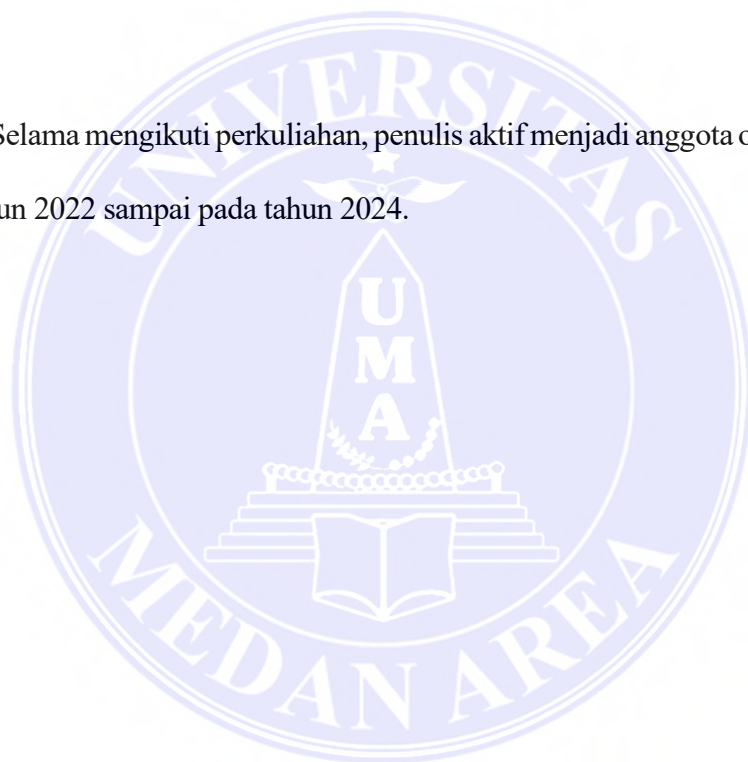


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sipahutar, Ambar Salengkat Pada tanggal 23 September 2002 dari ayah Marudut Simanjuntak dan ibu Rusmaudur Simare-mare. Penulis merupakan anak ke 5 dari 8 bersaudara.

Tahun 2020 Penulis lulus dari Y.P Raksana Medan dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif menjadi anggota organisasi GMKI pada tahun 2022 sampai pada tahun 2024.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Tema yang penulis pilih dalam penelitian ini ialah tentang pemberdayaan masyarakat yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok tani (Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara)”

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Marlina Deliana S.AB, M.AB, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dan selalu memberikan waktu dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada kepala desa dan masyarakat desa yang membantu penulis selama melaksanakan penelitian .

Ungkapan terimakasih besar juga di sampaikan kepada ayah Marudut Simanjuntak, dan ibu Rusmaudur Simare-mare, serta kakak saya Priska, abang saya Melki Sedek, Leonardo, Eska , adik saya Sriani, Michaeldo, Finesia, atas doa dan dukungannya selama melampaui pendidikan saya .

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/ skripsi/ tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kiritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas/akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Penulis

Hertiani Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peran	11
2.2 Pemerintah Desa	13
2.2.1 Pengertian Pemerintah	13
2.2.2 Pengertian Desa	14
2.2.3 Peran Pemerintah Desa	16
2.3 Pengertian Pemberdayaan.....	18
2.4 Kelompok Tani	21
2.5 Penelitian Terdahulu	27
2.6 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	31
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2.2 Waktu Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	33

3.4 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknis Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Hasil Pembahasan	39
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	39
4.1.2 Visi, Misi Tujuan Dan Sasaran Pemerintahan Desa Sabungan Nihuta I40	
4.1.3 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sabungan Nihuta I	47
4.2 Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	48
4.3 Pembahasan Penelitian	60
4.4 Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 2. Rincian Waktu Penelitian.....	32
Tabel 3. Informan Pnelitian.....	34
Tabel 4. Bantuan Sarana Dan Prasarana Anggota Kleompok Tani Desa Sabungan Nihuta I.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase pekerja sektor pertanian menurut kabupaten / kota sumatera utara, tahun 2019-2021... ..	3
Gambar 2 Kerangka berpikir	30
Gambar 3 Kantor pemerintahan desa sabungan nihuta I.....	40
Gambar 4 bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sabungan nihuta I.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Observasi	73
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran III Surat Izin Penelitian	80
Lampiran IV Hasil Observasi.....	81
Lampiran V Deskripsi Hasil Wawancara	83
Lampiran VI Dokumentasi	90



BAB I PENDAHULUAN

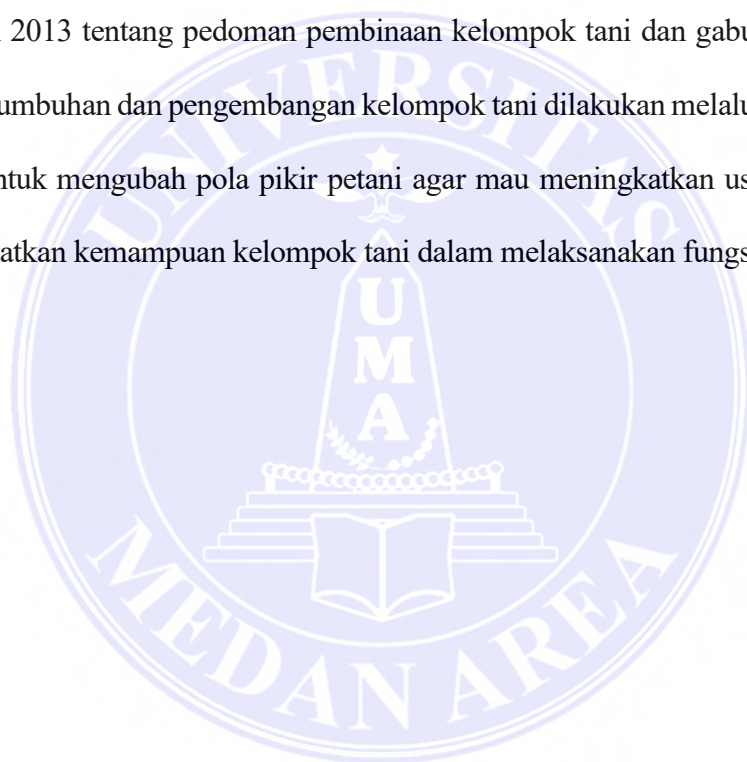
1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan sebutan agraris yaitu indonesia yang ditunjukan dengan besarnya luas lahan dan perkebunan maka dari sini tidak salah lagi ada 40,69 juta jiwa yang bekerja di sektor pertanian sesuai dengan data BPS 2023, pertanian itu di identikkan dengan daerah pedesaan. Karena pertanian di Indonesia sebagian besar hanya ditemukan pada daerah pedesaan. Eratnya kaitan antara eksistensi desa dan pertanian ini menyebabkan orang cenderung mengidentifikasikan desa dengan pertanian dan menyatakan bahwa masyarakat desa adalah petani dan petani adalah masyarakat desa. Bukan hanya itu, mayoritas masyarakat desa juga mendapatkan penghasilan dari bertani. Maka diperlukan pembangunan pemberdayaan petani karena hasil ini dapat meningkatkan mutu makanan penduduk dan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah pedesaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dari tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah , sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di pedesaan. Berdasarkan data BPS (2018), penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87 %) berasal dari sektor pertanian . Kondisi ini mengidintikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan rawan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan pedesaan. (Saragih Bernatal 2021: 17).

Desa sendiri menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu (Anwas, 1992:34). Kelompok tani merupakan terobosan yang tepat bagi masyarakat Desa Sabungan Nihuta I, yang prioritas bekerja sebagai petani. Dalam peraturan menteri pertanian no 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya.



Gambar 1. Persentase pekerja sektor pertanian menurut kabupaten / kota Sumatera utara, tahun 2019-2021

Kabupaten Kota	Persentase Pekerja Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Sumatera Utara	35,54	35,43	35,62
Nias	78,48	81,62	78,83
Mandailing Natal	48,80	43,76	43,08
Tapanuli Selatan	60,45	61,37	62,54
Tapanuli Tengah	54,39	52,72	53,18
Tapanuli Utara	60,39	61,90	62,91
Toba Samosir	55,36	59,36	59,50
Labuhan Batu	42,65	40,44	37,30
Asahan	33,39	32,03	34,08
Simalungun	45,30	46,56	47,64
Dairi	70,00	73,49	70,07
Karo	61,88	64,22	63,30
Deli Serdang	12,61	14,17	14,54
Langkat	42,67	40,19	39,12
Nias Selatan	77,32	75,69	76,05
Humbang Hasundutan	68,45	71,63	71,60
Pakpak Bharat	64,27	69,18	59,12
Samosir	63,41	71,14	65,11
Serdang Bedagal	42,01	37,94	35,57
Batu Bara	36,81	33,50	33,49
Padang Lawas Utara	69,59	72,13	67,44
Padang Lawas	52,57	54,54	51,69
Labuhanbatu Selatan	61,02	57,25	55,19
Labuanbatu Utara	46,08	48,37	50,72
Nias Utara	68,11	67,11	66,92
Nias Barat	74,91	85,92	73,25
Sibolga	12,48	13,77	14,35
Tanjungbalai	20,11	23,45	21,38
Pematangsiantar	5,79	6,85	8,08
Tebing Tinggi	5,76	5,33	5,75
Medan	5,21	3,69	3,59
Binjai	7,09	6,75	8,85
Padangsidempuan	15,37	18,28	17,18
Gunungsitoli	30,83	26,67	25,70

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kesadaran pemerintah akan adanya potensi sumber daya manusia dan sumber alam yang masih belum di kembangkan dan diberdayakan secara maksimal

oleh masyarakat kelompok tani. Karena itu pemerintah harus memberdayakan masyarakat kelompok tani untuk pembangunan pertanian. Dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menyatakan persentase pekerja sektor pertanian di Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu pada tahun 2019 ada 60,45 % pekerja disektor pertanian, pada tahun 2020 ada 61,90 % pekerja disektor pertanian, dan di tahun 2021 ada 62,91% pekerja disektor pertanian, dilihat dari persentase pekerja sektor pertanian yang semakin bertambahnya tahun semakin bertambahnya juga pekerja pada sektor pertanian di wilayah Tapanuli Utara, sudah sepantasnya pemerintah untuk memberdayakan petani yang ada.

Besarnya kebutuhan dan potensi di bidang pertanian yang mengharuskan adanya pemberdayaan pada masyarakat petani. Undang Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 1 BAB 1 yaitu “pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”. Dilihat dari segi permasalahan yang sering terjadi yaitu minimnya pengetahuan masyarakat petani dalam mengelola dan mengembangkan lahan yang tersedia, petani yang belum mampu mengatasi penyakit yang menyerang tanaman mereka, kurangnya modal dan mahalnya kebutuhan pokok yang dibutuhkan petani seperti pupuk, bibit tanaman dan juga alat pertanian sehingga dari permasalahan ini masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah untuk memberdayakan petani melalui kelompok tani yang sudah

dibentuk oleh pemerintah untuk menghasilkan kelompok tani yang lebih bermutu dan dapat menciptakan para petani yang produktivitas dan petani yang dapat menghasilkan hasil panen yang unggul dan berkualitas.

Untuk mencapai pertanian kelompok yang efektif, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada organisasi-organisasi yang mengembangkan kepemimpinan lokal, khususnya di bidang ekonomi dan organisasi yang efektif. Hal ini karena organisasi-organisasi tersebut mempunyai modal sosial dan kemampuan untuk mengelola kepemimpinan informal dan lokal secara efektif. Selain itu, pemerintah harus lebih menekankan pada pengembangan kompetensi pegawai yang lebih selaras dengan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap organisasi-organisasi yang mengembangkan kepemimpinan lokal, khususnya di bidang ekonomi dan organisasi. Hal ini karena organisasi memiliki modal sosial dan kemampuan untuk mengelola kepemimpinan informal dan lokal secara efektif. Untuk berkembang secara efektif kepemimpinan lokal yang lokal seseorang harus mengedepankan empat kualitas pelayanan : dapat dipercaya , kompeten, komunikasi, dan memiliki komitmen tim yang kuat dalam membangun tim untuk memenuhi kebutuhan dan harapan anggota secara kooperatif serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan anggota (Karsidi, 2001 : 23).

Pemerintah memiliki program dalam pemberdayaan kelompok tani yaitu dengan memberikan penyuluhan pertanian yang telah di atur dalam Permentan No.3 Tahun 2018 dilakukan secara integrasi dengan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Penyuluhan ini dapat menunjukkan kompetensi penyuluh dalam memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi, budidaya, harga, akses, pasar dan pemodalannya maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis memuat tentang penjabaran aspirasi kebutuhan petani di Desa Sabungan Nihuta dan Program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali tercapainya tujuan penyuluhan. Dengan tersusunya program penyuluhan pertanian di Desa Sabungan Nihuta I ini diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokasi yang strategis dan mempunyai daya yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah dan pendapatan petani sekaligus sebagai bahan informasi untuk dinas yang terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan pertanian. Pengimplementasian program penyuluhan di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar ini telah berjalan semenjak 2018 hingga saat ini, tetapi program ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah secara maksimal. Sehingga hasil panen di Desa Sabungan Nihuta ini tidak maksimal.

Salah satunya adalah hasil panen nenas di Desa Sabungan Nihuta pada tahun 2021 sangat buruk dikarenakan adanya wabah penyakit yang menyerang tanaman nenas ini tetapi masyarakat tidak mampu mencari solusi untuk menghilangkan penyakit tersebut, berdasarkan kutipan dari bapak Ir. Tangkas Manimpan Lumbantobing, ST mengatakan bahwa “peran pemerintah terhadap petani nenas yang ada di Sipahutar tidak dijalankan dengan baik, keresahan masyarakat semakin memuncak, karena Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke desa untuk memberikan penyuluhan pertanian tidak pernah

kelihatan, masyarakat sangat mengharapkan agar segera di utus ahli pertanian yang membidangi tanaman nenas, agar bisa mengatasi penyakit layu daun dan batang mengering tersebut, supaya jangan sampai petani mengalami kerugian yang sangat besar, dikarenakan petani gagal panen tegas, Ir.Tangkas Manimpan Lumbantobing,ST. Bapak Ir.Tangkas Manimpan Lumbantobing,ST juga menyampaikan keluhan petani Desa Sabungan Nihuta, yang menganggap pemerintah tidak sungguh sungguh memberikan bantuan terhadap mereka. Masyarakat sering menerima bantuan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, karena banyak bantuan yang yang disalurkan, tapi tidak sesuai yang dibutuhkan para petani dan alat alat pertanian yang diberikan tapi tidak dapat digunakan sehingga petani merasa kecewa. Dari permasalahan ini masyarakat petani desa sabungan nihuta sangat membutuhkan peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani untuk menghasilkan para petani yang lebih unggul dan dapat mengatasi penyakit wabah yang terjadi, selain itu pemerintah harus memberikan penyuluhan langsung terhadap perkembangan tanaman nenas di Sipahutar supaya lebih mendapatkan hasil tanaman yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para petani.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Kasming, 2019) menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisator yakni: (1) Sosialisasi, (2)Pendampingan, (3)Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator

sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.

Dilihat juga dari penelitian yang telah dilakukan oleh Anggreyni Raintung, (2021) Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemerintah sebagai dinamisor telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam pemberdayaan masyarakat guna menunjang keberhasilan aktifitas pertanian yang ada di Desa Mobuya, dengan membentuk kelembagaan pertanian berupa Gapoktan, melalui rapat evaluasi anggota kelompok tani memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani agar aktivitas pertanian kelompok tani bisa berjalan baik. Namun sangat disayangkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani yaitu pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan sasaran, karena pembentukan kelompok tani tidak dipisahkan sesuai dengan keperluan petani. Sehingga membuat partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani serta kendalanya di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI (Studi Kasus Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani

yang ada di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara?

2. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan pemerintah desa di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan pemerintah desa di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, adapun manfaat dari penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan menulis berdasarkan penelitian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pemerintah, khususnya pemerintah desa, dalam pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Tani mengenai peran dan fungsi mereka masing-masing dalam mengelola pemerintah desa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Peran merujuk pada peranan atau fungsi yang dimainkan oleh individu, objek, atau entitas dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Peran dapat bervariasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial, pekerjaan, keluarga dan lainnya. Peran juga dapat mencakup tanggung jawab, tugas, perilaku, dan ekpetasi yang berkaitan dengan individu atau entitas yang dimainkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2013, peranan adalah sesuatu hal atau peristiwa yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa tersebut.

Peran menurut Koentjaraningrat, tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu pengharapan kompleks manusia tentang cara seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu yang didasarkan pada status dan fungsi sosialnya.

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Menurut Bachtiar (2011: 8) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan.

Peran menurut (Soekanto, 2004) sosiologi pemerintahan dapat dibagi dalam 3 cakupan yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan peran menurut Komaruddin (1994:768) adalah :

1. Bagian dari tugas utaman yang dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu proses.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atas pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari uraian para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran (role) merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh pemimpin dengan baik sesuai dengan norma norma yang ada dan menyesuaikan posisinya di tempat dimana seseorang diberi kepercayaan dan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam sebuah organisasi maupun masyarakat.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah

Secara Secara etimologi, pemerintah berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah mengacu pada peringkat tertinggi, pemerintah resmi di suatu negara. Hal ini juga digunakan sebagai sistem untuk memulai perubahan positif yang kuat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pengertian umum "pemerintahan" secara mengacu pada proses atau metode yang digunakan pemerintah untuk memulai inisiatif di berbagai bidang ekonomi, politik, administrasi, dan sebagainya, dengan tujuan mengatasi berbagai masalah nasional demi kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, "pemerintahan" mengacu pada semua tindakan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan

oleh badan eksekutif untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah mendefinisikan pemerintahan sebagai suatu kegiatan yang berdasarkan pada kemerdekaan dan konservasi, yang mencakup dasar negara, populasi, dan wilayahnya untuk mencapai beberapa tujuan negara.

Menurut (R. Mac Iver, 2003), Pemerintah dipandang sebagai suatu kumpulan orang yang memiliki kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh manusia. Mereka juga memandang pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari semua perusahaan manusia yang ada. Sedangkan menurut (Samuel E Ward Finer, 2003) Pemerintah harus menjalankan kegiatan yang terus-menerus pada wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah dengan cara, metode, dan sistem pemerintah terhadap masyarakatnya.

Menurut Wilson (1903:572) Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian; mereka adalah dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diorganisasikan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan memberikan hal-hal yang diperhatikan publik. Mereka tidak selalu berafiliasi dengan organisasi angkatan bersenjata. Sedangkan menurut Ndraha (2005), Pemerintah adalah otoritas negara atau sekelompok lembaga negara yang membantu negara mencapai tujuan.

2.2.2 Pengertian Desa

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu desa yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat

istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di wilayah kabupaten. Desa dibangun oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan sejarahnya. Penggabungan beberapa desa, gabungan bagian desa yang bersanding, pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada adalah beberapa contoh pembentukan desa.

Desa menurut UU No.6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang Undangan diserahkan kepada desa.

R.Bintarto (2010:6) menyatakan bahwa desa juga dapat dianggap sebagai hasil dari kegiatan sekelompok orang dengan lingkungannya. Perpaduan ini menghasilkan wujud atau kenampakan Bumi yang terdiri dari unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain dan satu sama lain. Sedangkan menurut H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa memiliki hak asal-usul sendiri. Pemerintahan desa mengutamakan konservasi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.3 Peran Pemerintah Desa

Labolo (2010:36) Sebagai bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlu adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran secara aktif kepada masyarakat. Labolo mengemukakan bahwa ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. pemerintah sebagai regulator

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan dan menggerakkan

masyarakat dalam peran regulatornya, yang berarti mereka harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menetapkan dan menetapkan peraturan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pembangunan. Pemerintah memberikan pedoman dasar untuk kegiatan pemerintah, dan masyarakat umum menggunakan pedoman ini untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah memberikan pedoman dasar ini, yang kemudian digunakan oleh masyarakat umum sebagai pedoman untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yang melibatkan memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat dan memberikan arahan dan dorongan kepada masyarakat untuk bergerak dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini melakukannya tanpa mempertimbangkan kelas sosial. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah harus menjadi agen yang mampu membuat dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terbuka, serta berperan untuk menyambungkan kepentingan pemerintah ke masyarakat begitupun

sebaliknya dalam hal pengoptimalisasi kegiatan pembangunan daerah. seperti memberikan rekomendasi dan sarana untuk pembangunan, baik untuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah membantu melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendanaan untuk menyediakan modal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

2.3 Pengertian Pemberdayaan

Konsep dasar tentang pemberdayaan atau pemberkuasaan (pemberdayaan) terkait langsung dengan gagasan kekuasaan, yang berasal dari kata "power", yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, kekuasaan selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan, meskipun mereka juga memiliki keinginan sendiri yang disembunyikan (Soeharto, 2005). Dalam hal program pemberdayaan pemerintah, budaya patriarki yang kuat di Indonesia merupakan salah satu faktor penghambat pemberdayaan. (Hastuti dan Respati 2009).

Pemberdayaan, yang ditulis (Eko Sudarmanto dkk 2020:21), Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan martabat dan harkat sekelompok orang yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk bernegosiasi dan mengontrol lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini merupakan pemberdayaan menurut *world bank* dalam (Zubaedi 2014:75).

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat mengacu pada pengalihan kekuasaan pada kelompok masyarakat melalui penguatan modal sosial untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang

kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga.

Paradigma pemberdayaan masyarakat, yang merupakan masalah utama, muncul dari fakta bahwa ada perbedaan yang tidak dapat diperbaiki, terutama antara masyarakat yang tinggal di perdesaan, terpencil, dan terbelakang. Pada dasarnya pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan fokus pembangunan. Paradigma pemberdayaan menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah proses pembangunan yang mendorong inisiatif masyarakat dari tingkat bawah (Alfitri, 2011:21).

Di era globalisasi saat ini, istilah "pemberdayaan" semakin populer dalam konteks penggunaan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan (*empowerment*) terkait dengan kekuasaan (*power*). Konsep ini bermula dari kenyataan bahwa seseorang atau masyarakat tidak berdaya atau pihak yang lemah. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan orang lain memiliki hubungan dengan kekuasaan. Kemampuan tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dan mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan keinginan orang lain.

Djohani, (2003 : 43) mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah

(*powerlness*) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga menjadi keseimbangan.

Selain itu, Rappaport (1984: 49) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan individu, kelompok, dan komunitas untuk memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan tekanan pada aspek pendelegasian atau pemberian kekuasaan dan memberi wewenang atau penyerahan kekuasaan pada individu, kelompok, atau masyarakat yang mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai keinginan, potensi, dan kemampuan mereka. Pemberdayaan juga menekankan pentingnya proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau sehingga masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, dan hidup sendiri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada bab 2 tentang asas, tujuan, dan lingkup pengaturan dijelaskan pada pasal 3 yaitu:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani.
3. Memberikan kepastian Usaha Tani.
4. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan

Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan dan

6. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

2.4 Kelompok Tani

Pada dasarnya, kelompok tani adalah kelompok pertanian yang dibentuk oleh petani yang saling mengenal, akrab, dan percaya satu sama lain, memiliki kepentingan dalam usaha tani, dan memiliki kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya). Kelompok-kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Kelompok-kelompok ini dibentuk oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, dan percaya satu sama lain, memiliki kesamaan dalam hal tradisi, pemukiman. Kelompok tani membantu petani yang tergabung dalam keanggotaan untuk memfasilitasi segala kebutuhan mulai dari pembelian sarana produksi sampai penanganan pascapanen dan pemasarannya.

Menurut peraturan menteri pertanian nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani juga dapat diartikan organisasi non-formal di perdesaan yang ditumbuh kembangkan “dari, oleh dan untuk petani”. Kelompok tani merupakan kelembagaan (institusi) non-formal dipedesaan yang beranggotakan petani-petani yang mempunyai kepentingan yang sama, yakni meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya (Kartasapoetra,

1994 : 71). Menurut Mardikanto (1993 : 110) Kelompok tani adalah kelompok atau kesatuan yang hidup bersama karena mereka saling mempengaruhi dan bertahan lama. Terbentuknya kelompok tani memiliki banyak keuntungan, seperti berikut:

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbanyak kepemimpinan kelompok
2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani
3. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru
4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani
5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya
6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Kelompok petani biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kondisi di lingkungan petani. Dengan membentuk kelompok petani yang memahami, pelatihan yang diberikan untuk membantu petani menjadi mandiri, mengembangkan inovasi, dan menganalisis usahatani mereka, sehingga petani dan keluarga dapat memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang layak. Dibentuknya kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kerjasama petani dan nelayan baik di dalam organisasi kelompok tani maupun dengan pihak lain di luar kelompok tani. Kerjasama ini diharapkan akan menjadikan kelompok pertanian lebih produktif dan lebih mampu mengatasi masalah, hambatan, gangguan, dan ancaman yang terkait dengan pertanian. bisa juga digunakan

sebagai tempat petani belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengurus dan anggota.

UU No 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi rencana, perlindungan, pemberdayaan, dan pembiayaan petani, pengawasan, peran masyarakat, dan keadilan dan kelangsungan hidup. Untuk melindungi petani, kebijakan dapat mengatur impor komoditas pertanian yang sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan nasional; penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produksi; dan menetapkan tarif bea masuk dan lokasi pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri ke wilayah Pabean. Selain itu, kawasan usaha tani ditetapkan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia, dan buatan; fasilitasi. Asuransi Pertanian berfungsi untuk melindungi petani dari gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan risiko lain yang ditetapkan oleh menteri. Selain itu, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, asuransi pertanian juga dapat memberikan kompensasi gagal panen. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, upaya pemberdayaan juga sangat penting selain kebijakan perlindungan terhadap petani. Upaya ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir petani, meningkatkan usaha mereka, dan menumbuhkan serta memperkuat kelompok petani mereka sehingga mereka dapat menjadi usaha tani yang mandiri dan berdaya saing. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi

dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Salah satu komponen terbentuknya kelompok tani yang efektif adalah berlangsungnya kepemimpinan dari pengurus kelompok yang berpartisipasi dalam struktur kerja kelompok. Dinamika kelompok sangat diharapkan agar kelompok tani dapat berkembang dengan wajar, sehingga perkembangan kelompok dapat diarahkan dan berlangsung secara dinamis. Selain itu, kelompok tani juga harus mengembangkan kader pengurus yang akan menjadi penerus kelompok tani. (Sastraadmadja, 1993 : 18)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013, ciri-ciri kelompok tani adalah:

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota.
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani.
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Unsur-unsur faktor terikatnya kelompok tani kelompok tani adalah:

1. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya.
2. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya.

3. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya.
4. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
5. Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Fungsi kelompok tani :

1. Kelompok tani adalah wadah belajar mengajar bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (PKS) serta menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian dalam pertanian, sehingga produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan meningkat.
2. Wahana Kerjasama Kelompok: Ini adalah tempat untuk meningkatkan kerjasama antara petani dalam kelompok, antar kelompok, dan dengan pihak lain. Dengan bekerja sama, usahatannya diharapkan menjadi lebih produktif dan lebih tahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
3. Unit produksi, yaitu usaha tani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, harus dianggap sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.

Pengembangan Kelompok Tani :

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk melaksanakan fungsi dan memberikan kemampuan kepada para anggotanya untuk

mengembangkan agribisnis, sehingga kelompok tani berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dengan ciri-ciri berikut:

1. Adanya pertemuan /rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan ;
2. Disusunnya rencana kerja kelompok (RDK/RDKK) secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
3. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
4. Memiliki pencatatan /pengadministrasian organisasi yang rapih;
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir.
6. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar;
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
8. Adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain ;
9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk menjadi pedoman bagi penelitian ini yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1	"Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo" Skripsi Ilmu Adminitrasi Negara. Oleh Kasming. 2019	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh aspek pemerintah sebagai pengontrol, yaitu aturan dan mekanisme, dan aspek pemerintah sebagai dinamisator, yaitu (1) sosialisasi, (2) pendampingan, (3) pelatihan, dan (4) kunjungan lapangan. Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator, yaitu sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.	Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat kelompok tani. Akan tetapi perbedaannya dapat pada lokasi penelitian sekarang dan yang terdahulu.
2	"Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberday an Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow". Jurnal Governance Anggreyini Raintung, (2021)	Kualitatif	Kelembagaan pertanian yang dikenal sebagai Gapoktan, yang mengadakan pertemuan evaluasi anggota kelompok tani dan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani untuk memastikan bahwa operasi pertanian mereka berjalan dengan baik. Namun, sangat memalukan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan petani,	Perbedaannya pada penelitian lokasi penelitian terdahulu Terdapat di desa Mobuya kecamatan passi timur kabupaten bolaang mangondow

No	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			karena pembentukan kelompok tani tidak dipisahkan sesuai dengan kebutuhan petani. Oleh karena itu, tingkat partisipasi anggota kelompok tani dalam pelatihan dan penyuluhan sangat rendah.	
3	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kertamukti telah berusaha mendukung petani melalui pelatihan dan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan. Penulis mengatakan bahwa Pemerintah Desa Kertamukti melakukan pekerjaan cukup baik, namun masih kurang maksimal.	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan masyarakat petani yang ada di desa kertamukti kecamatan cibitung kabupaten bekasi , sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kelompok tani yang ada di desa sabungan nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara , dan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.
4	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Kualitatif	Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang cukup baik. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat petani, pemerintah desa melakukan berbagai upaya seperti memotivasi melalui kegiatan-kegiatan kelompok tani khususnya disektor pertanian. Pemerintah Desa mengadakan pelatihan-pelatihan dalam ranah pertanian seperti	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana strategio yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemberdayaan petani yang ada di tanjung morawa, sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan

No	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
			nenggunakan Handtractor, alat panen, dan alat tanarn.	kelompok tani yang ada di Desa Sabunganni Huta I

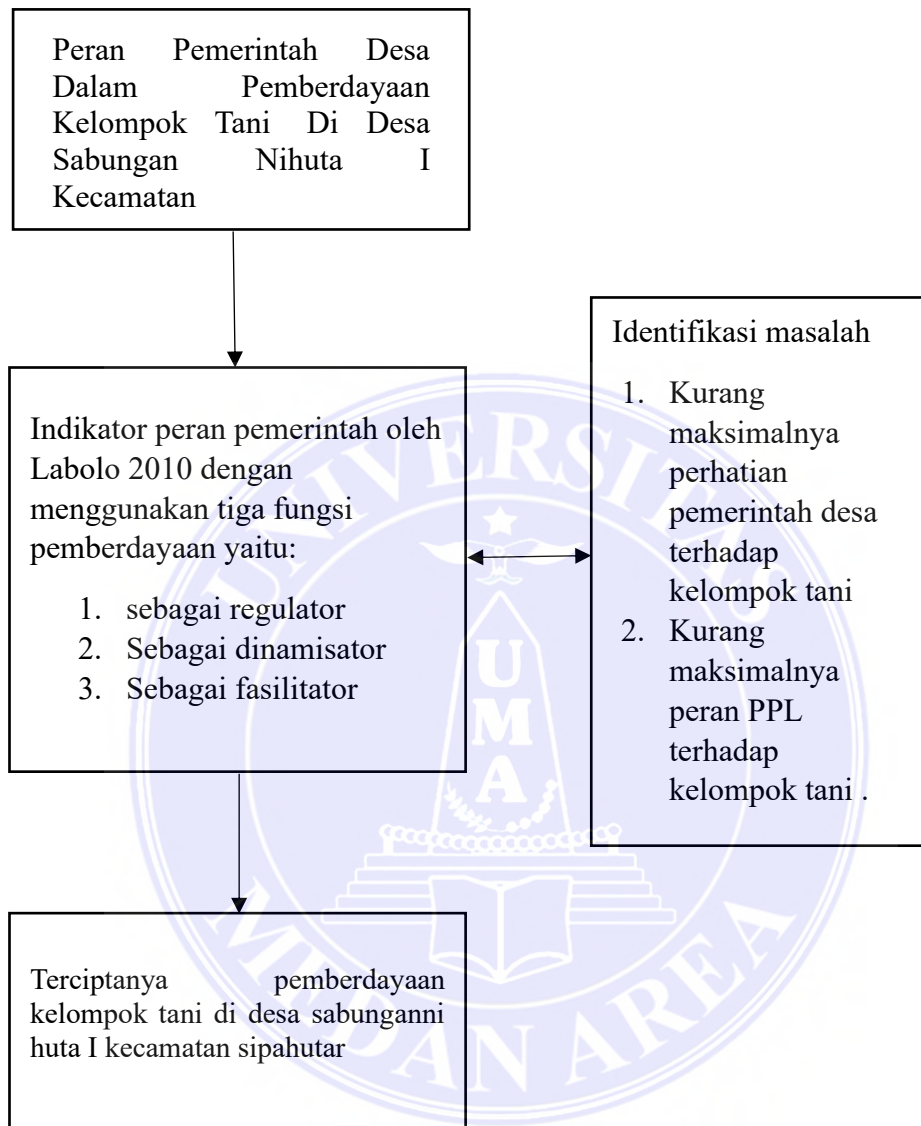
Sumber: Data olahan peneliti, 2024

Secara umum, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu bahwa peneliti yang sekarang berfokus pada bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok, terdapat juga pada perbedaan pada teori dan lokasi penelitian, sedangkan sebagian dari peneliti terdahulu ada yang berfokus pada strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani.



2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sugiyono (2018:2) menyatakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan data dengan menggambarkan atau menguraikan data dengan kata kata bukan dengan angka sesuai dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian terkait dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani (studi kasus di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara).

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, sebelumnya harus menentukan lokasi tempat peneliti dalam melakukan penelitiannya tersebut. Maka dari itu peneliti telah menentukan lokasi peneliti yaitu di kantor pemerintahan desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti tertarik akan permasalahan di desa sabungan nihuta 1 bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani yang belum berjalan dengan baik.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Sabunganni Huta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara) . dimulai sejak bulan desember 2023 sampai selesai. Berikut proses kegiatan yang dilakukan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Peneltian

Tabel 2. Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agust 2024
1.	Penyusunan Proposal	■	■								
2.	Seminar Proposal		■								
3.	Perbaikan Proposal			■							
4.	Pelaksanaan Penelitian				■						
5	Penyusunan skripsi					■	■	■			
6	Seminar hasil							■			
7	Perbaikan skripsi								■	■	
8	Sidang meja hijau										■

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek peneliti dari mana data penelitian yang diperoleh dan yang memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang masalah penelitian sehingga mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga dapat berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan menggunakan teknik *sampling purposive* berdasarkan pertimbangan dan tujuan khusus. Informan ini benar-benar menguasai subjek yang diteliti peneliti.

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar, maka peneliti memilih orang-orang yang mengetahui dan yang terlibat langsung dalam objek penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi :

1. Informan inti adalah para ahli yang sangat memahami masalah penelitian dan dapat menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Informan inti tidak dibatasi oleh tokoh masyarakat, akademisi, atau wilayah tempat tinggal. (Sugiyono,2019). Adapun informan inti dalam penelitian ini adalah bapak kepala desa Sabungan Nihuta I
2. Informasi utama adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis dan detail tentang subjek penelitian yang akan dipelajari. (Sugiyono,2019). Yang , menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah sekretaris desa, kepala bidang kasi pertanian , anggota PPL (Penyuluh Bidang Pertanian) di desa Sabungan Nihuta I.
3. Informasi tambahan, yaitu orang-orang yang ditemukan di bidang penelitian dan dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan

informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono,2019). Yang menjadi informan tambahan adalah ketua kelompok tani dan masyarakat kelompok tani sebanyak 1 orang yang ada di desa Sabungan Nihuta I

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah orang	Keterangan
1	Kepala desa	1	Informan inti
2	Sekretaris desa	1	Informan utama
3	Kepala bidang kasi Pemerintahan	1	Informan utama
4	PPL (penyuluh pertanian lapangan)	1	Informan utama
5	Ketua kelompok tani	1	Informan tambahan
6	Masyarakat petani	1	Informan tambahan
Total		6	

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, dan observasi. Jumlah informan pada penelitian kualitatif tidak dipermasalahkan. Jumlah informan dapat diambil dengan jumlah sedikit ataupun banyak, tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci (*key informan*) dan kompleksitas serta fenomena sosial yang diteliti sampai berakhirnya pengumpulan informasi.

Data primer dalam penelitian ini yaitu informan yang diperoleh dari ketua pertanian Kecamatan Sipahutar, kepala Desa Sabungan Nihuta I , ketua kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I , dan masyarakat petani.

2. Data Sekunder

Ruslan (2004: 138) mengungkapkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga yang telah tersedia, yang berbentuk laporan ataupun catatan data dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data data , buku-buku , referensi , arsip maupun dokumentasi tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang kemudian akan diteliti oleh peneliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang tepat, sistematis, dan strategis agar bisa mendapatkan data yang valid dan akurat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Peneliti harus benar-benar melakukan penelitian secara langsung untuk memastikan bahwa data dan teori penelitian tersebut valid, akurat, dan sesuai dengan kenyataan. Untuk mencapainya, peneliti harus benar-benar terjun dan mempelajari metode pengumpulan data secara langsung.

Proses pengumpulan data merupakan langkah utama sebelum melakukan proses analisis data interaktif. Idrus (2009:148) mengungkapkan bahwa “data kualitatif merupakan data berupa fenomena, kata-kata, foto, perilaku dan sikap sehari-hari yang didapatkan dari hasil observasi dengan menggunakan alat bantu berupa perekam suara, kamera, dan video.”

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah Triangulasi data. Triangulasi data merupakan gambaran data yang dikombinasikan dari berbagai sumber dan dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda dan

berasal dari orang yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi adalah metode dimana informasi dikumpulkan dan perilaku di selidiki. Sugiyono (2018:229) menegaskan Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang memiliki ciri – ciri tertentu dibandingkan dengan metode lainnya. Hal-hal lain juga bisa di amati, selain orang. Observasi yang dilakukan di lapangan untuk melihat dan mempelajari kondisi sebenarnya di Desa Sabunga Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara

2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur (*semistructure interview*). Peneliti sudah harus mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis namun tidak menyiapkan alternatif jawaban seperti halnya wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur berada di tengah-tengah yaitu penggabungan antara wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan suatu masalah agar lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ideidenya (Sugiyono, 2016: 233).

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis wawancara SemiTerstruktur, karena metode ini memungkinkan pertanyaan baru untuk

mendapatkan informasi yang dilakukan lebih mendalam tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berisi catatan catatan kunci tentang masalah yang diteliti, dengan menggunakan data yang ada untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. Dokumen tersebut dapat berupa gambar dan catatan dari lapangan yang dibuat oleh peneliti secara alami tentunya terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara .

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaksi. Huberman dan miles (1994) menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi.

1. Reduksi Data

merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode dan

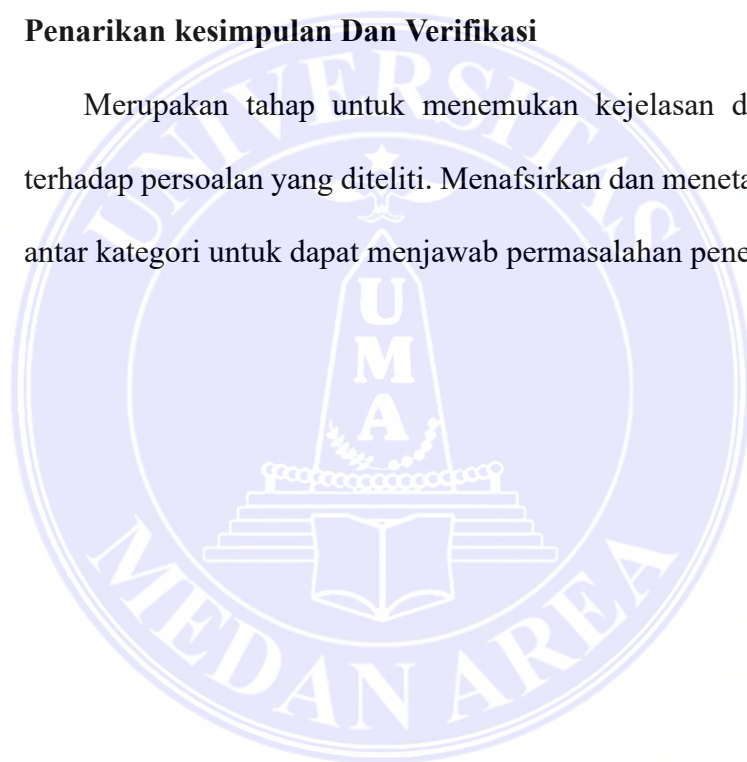
kategori dari data tersebut. Proses kategori dilakukan dengan memilah data teks atau visual ke dalam kategori khusus.

2. Penyajian Data

Setelah kategorisasi dilakukan dalam tahap reduksi data, data disusun secara sistematis dan diberi konteks dan narasi untuk menjadi dasar argumentasi. Tahap penyajian data adalah tahap berikutnya dalam proses penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan Dan Verifikasi

Merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara

1. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, ada tiga indikator yaitu regulator, dinamisator, fasilitator. Yang dimana indikator regulator dan fasilitator sudah optimal di laksanakan , sedangkan indikator dinamisator belum optimal dilaksanakan perannya sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
2. Faktor penghambat kurangnya antusias dan partisipasi masyarakat dan anggota kelompok, dikarenakan perseptif negatif yang dimiliki masyarakat mengenai peran pemerintah sebagai dinamisator yang dimana tugas dari PPL tidak dijalankan dengan baik.

5.2 Saran

Saran yang dapat saya sampaikan setelah saya melakukan penelitian di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

- a) Harus adanya peningkatan peranan pemerintah desa terkhusus kepada pihak PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) supaya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, kunjungan lapangan kepada masyarakat.
- b) Peningkatan mutu pelayanan dan kemampuan dengan pelatihan yang diberikan kepada aparat desa dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan pelayanan optimal bagi warga desa Sabungan Nihuta I.
- c) Diharapkan adanya peningkatan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani baik nenas, jagung, ubi dan padi di desa Sabungan Nihuta I. Serta dapat menjalin kerjasama dengan instansi lain baik swasta maupun pemerintah dalam hal bibit dan pupuk untuk petani.
- d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan yang akan dilakukan tidak hanya menjadi peserta namun menjadi pemikir ikut berdiskusi mengenai kebutuhan yang dibutuhkan untuk dijadikan program pemberdayaan petani di desa Sabungan Nihuta I.
- e) Diharapkan adanya peningkatan pemberian fasilitas dari dinas pertanian dan aparat desa baik mengenai bibit ,pupuk, maupun alat pertanian dengan harga terjangkau. Memberikan perhatian secara mendalam dan sungguh-sungguh bagi petani dalam membina dan membantu petani .

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Aggreyeni Raintung (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaan Mongondow. *Jurnal Governance*. Vol.1, No. 2, 2021. ISSN: 2088-2815
- Muhammad Viki Nisfani Al Azis(2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*. Vol VII, No.01. ISSN 25280-1852, e-ISSN: 2721-0537
- Tama, A. W.(2018). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)

BUKU

- Alfitri,(2011). *Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bahtiar, (2011). *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara: Unismuh Makassar*
- Bahua,(2016). *kinerja penyuluhan pertanian*, Yogyakarta: penerbit deepublish Bintarto,(2010). *Desa Kota , Bandung : Alumni*
- Djohani, (2003). Rianingsih. *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokratisasi Komunitas: Reposisi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Program Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Studio Driya Media
- Cogen , (1992). *Sosiologi Suatu Penganta*, Jakarta:Rineke
- Cipta Idrus, (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Jogiyanto hartono, (2003) *metoda pengumpulan dan teknik analisis data , yogyakarta: penerbit andi*
- Karsidi,(2001). *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan*.

Bogor: Pustaka Wirausaha Muda

Kencana Syaifiie,(2002) Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Rineka

Cipta Komaruddin,(1994) Ensiklopedia Manajemen. Jakarta:

Ghalia Indones

Labolo, Muhadam. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers

Miles, (1994). bijak. Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas

Ndraha,(2005). Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta: Rineka

Nugroho,(2021).

Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Elex Media Komputindo

Ruslan,(2004). Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo

Saragih bernatal dan ahmad R.U,(2021) Pangulu, pembangunan pertanian , yogyakarta: penerbit deepublish

Soekanto, (2002). Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara

Suharto,(2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, KajianStrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____.(2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : PT Remaja Sugiyono.

_____. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Totok Mardikanto,(2003). Redefinisi Penyuluhan, Jakarta : Penerbit Puspa,

Widjaja, (2009) Otonomi Desa

Wilson, (1903) The State

Zubaedi, (2014) Pengembangan Masyarakat. Wacana & Praktik. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

SKRIPSI

Isadora Sitorus Arinda. 2023. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Medan. Universitas Medan Area

Kasming. 2019 . peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa lompoloang kecamatan pitumpanua kabupaten wajo. Skripsi. Makassar. Universitas muhammadiyah makassar

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Desa. Undang undang no 6 tahun 2014 tentang masyarakat kesatuan

Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara hukum

Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

Peraturan menteri pertanian nomor 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani

Peraturan menteri pertanian 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang kelompok tani . Peraturan menteri pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 ciri ciri kelompok pertanian .Peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa

ARTIKEL

Annonim Ensiklopedia bebas. Wikipedia “ sipahutar tapanuli utara” https://id.wikipedia.org/wiki/Sipahutar,_Tapanuli_Utara. Diakses 12 agustus 2023

Badan pusat statistik. “Persentase pekerja sektor pertanian menurut kabupaten / kota sumatera utara, tahun 2019-2021”

<https://sumut.bps.go.id/indicator/6/54/1/1persentase-pekerja-sektor-pertanian-menurut-kabupaten-kota.html>. 2021

Ensiklopedia bebas. Wikipedia “ sabungan nihuta 1 kecamatan sipahutar kabipaten tapanuli utara” https://id.wikipedia.org/wiki/Sabungan_Nihuta_I,__Sipahutar,_Tapanuli_Utara. 18 juni 2022

Desa klampok “kelompok tani”. <https://www.klampok.id/blog/2018/08/21/kelompok-tani/>.21 agustus 2018

HarianSIB.Com. “Diserang Wabah Penyakit, Petani Nanas Sipahutar Resah” <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Diserang-Wabah- Penyakit--Petani-Nanas-Sipahutar->

Resah. 14 juli 2021

KOMPAS.COM. “pengertian pemerintah”.
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda>. 10 februari 2022.

Pelayanan publik id. “pengertian pemerintah dan pemerintahan tugas fungsi hingga jenisnya”.
<https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/> . 15 juni 2020.

Taputkab, “letak geografis” <https://www.taputkab.go.id/page/v/letak-geografis>. 2018



Lampiran I Pedoman Observasi
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI (STUDI KASUS DI DESA SABUNGAN NIHUTA I
KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA)

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati :
- b. Lokasi :
- c. Hari dan tanggal :

2. Aspek diamati

- a. meninjau langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi lingkungan Desa Sabungan Nihuta I
- b. mengamati kegiatan masyarakat petani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I
- c. Mengamati setiap kegiatan/program yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat kelompok tani

3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Visi Misi Pemrintah Desa			
2.	Struktur Pemerintahan			
3.	Program Pemberdayaan Kelompok Tani			
4.	Bantuan Terhadap kelompok Tani			
5.	Kegiatan Pertanian Masyarakat Petani			
6.	Sarana Dan Prasarana Pertanian			

Lampiran II Pedoman Wawancara
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI (STUDI KASUS DI DESA SABUNGAN NIHUTA I
KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA)

Identitas responden I (informan inti)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdyaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I?

Identitas responden II (informan utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdyaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I?

Identitas responden III (informan utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :

3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I?

Identitas responden IV (informan utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I?

dentitas responden V (informan utama)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I?

Identitas responden VI (informan tambahan)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I?

Lampiran III Surat Izin Penelitian



Lampiran IV Hasil Observasi
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI (STUDI KASUS DI DESA SABUNGAN NIHUTA I
KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA)

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Lembaga Kelompok Tani
- b. Lokasi : Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
- c. Hari dan tanggal : Kamis, 01 februari 2024

2. Aspek diamati

- a. Meninjau langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi lingkungan Desa Sabungan Nihuta I
- b. Mengamati kegiatan masyarakat petani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I
- c. Mengamati setiap kegiatan/program yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat kelompok tani

3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Visi Misi Pemerintah Desa	<input type="checkbox"/>		Visi dan misi kepala desa tertera di kantor pemerirntah desa
2.	Struktur Pemerintahan	<input type="checkbox"/>		Struktur pemerintahan tertera jelas dikantor pemerintah desa beserta dengan bidangnya
3.	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	<input type="checkbox"/>		program pemberdayaan kelompok tani yang dilakukakn oleh pemerintah desa sudah cukup baik dilaksanakan, seperti aturan yang berlaku, penyuluhan maupun bantuan.
4.	Bantuan Terhadap kelompok Tani	<input type="checkbox"/>		Bantuan terhadap kelompok tani yang dilakukan pihak pemerintah desa dikatakan cukup baik. Dimana banyak bantuan yang telah disalurkan terhadap kelompok tani seperti bantuan pupuk benih dan alat pertanian lainnya
5.	Kegiatan Pertanian Masyarakat Petani	<input type="checkbox"/>		Kegiatan sehari hari masyarakat petani yaitu pergi ladang nenas mereka.

6.	Sarana Dan Prasarana Pertanian	<input type="checkbox"/>		Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan pemerintah sudah ada beberapa seperti handtraktor, alat penanam jagung, membantu pertanian di Desa Sabungan Nihuta I
----	--------------------------------	--------------------------	--	--



Lampiran V Deskripsi Hasil Wawancara

Identitas responden I (informan inti)

1. Nama : Radot Tomuan Simanjuntak
2. Jenis kelamin : Laki - laki
3. Umur : 51 Tahun
4. Pekerjaan : Kepala Desa
5. Pendidikan : SMA

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Jawab: Sebagai pemerintah setempat saya telah membuat peraturan pada kelompok tani, yang tentunya untuk meningkatkan keaktifan kelompok tani tersebut, yaitu kelompok tani harus melakukan pertemuan pada hari sabtu di setiap akhir bulan pada pukul 18.00 wib, dan pada pertemuan ini kelompok tani di himbau supaya memberikan iuran sebesar Rp.15.000. Rp. 5.000 untuk kas dan Rp.10.000 di gunakan untuk membeli gelas kepada setiap anggota kelompok tani, apabila salah satu anggota kelompok tani tersebut telat dari pukul 18.00 wib atau tidak dapat hadir maka gelas seseorang tersebut akan di undi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kedisiplinan anggota kelompok tani.

Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani?

Jawab: peran pemerintah sebagai dinamisor itu memang ada, di Desa ini tetapi untuk masalah penyuluhan ataupun sosialisasi itu di serahkan pada pihak PPL yang ada di kecamatan sipahutar ini

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani

dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I ? **Jawab :** peran pemerintah sebagai dinamisator itu memang ada, di Desa ini tetapi untuk masalah penyuluhan ataupun sosialisasi itu di serahkan pada pihak PPL yang ada di kecamatan sipahutar ini

Identitas responden II (informan utama)

1. Nama : Juniarman Simanjuntak
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Umur : 49 Tahun
4. Pekerjaan : Sekretaris Desa
5. Pendidikan : SMA

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Jawab : Peran pemerintah sebagai regulator atau pemberi aturan pada kelompok tani telah dilakukan pemerintah, seperti yang sudah dikatakan oleh bapak kepala desa bahwa kelompok tani harus melakukan pertemuan setiap sabtu di akhir bulan, tujuannya untuk mengayomi setiap anggota kelompok, di pertemuan itu akan dibahas apa saja yang perlu dibenahi di dalam melakukan pertanian kelompok tani tersebut

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Jawab: Kalo untuk penyuluhan maupun sosialisasi itu jarang kami lakukan sebagai pemerintah desa, biasanya itu tugas dari pihak PPL

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan

Nihuta I? **Jawab** : Yang di sampaikan oleh bapak kepala desa itu sudah sepenuhnya disitu, yang dimana pemerintah desa mengupayakan secara optimal dalam memfalisasi masyarakat petani di desa ini, karena desa ini mayoritas petani, dan semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa sudah di serahkan secara langsung pada

Identitas responden III (informan utama)

1. Nama : Martin Dennai Simanjuntak
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Umur : 36 Tahun
4. Pekerjaan : Kaseksi Pemerintahan
5. Pendidikan : S1

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Perturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Jawab: saya selaku kaseksi pemerintahan sejalur denga yang di sampaikan kepala desa, apapun yang menjadi peraturang yang dibuat oleh beliau saya mengikuti saja

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Jawab: sosialisasi biasanya kami ajukan kepada PPL untuk dilaksanakan apabila terdapat program dari pemerintah provinsi atau pusat untuk di laksanakan di daerah selain itu juga pihak PPL itu sudah memiliki jadwal tertentu untuk melakukan penyuluhan ke setiap desa di sipahutar ini

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisatian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdyaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I ?

Jawab: Saya sependapat dengan bapak kepala desa dan bapak sekretaris desa yang dimana pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat

Identitas responden IV (informan utama)

1. Nama : Lenta Batubara SP
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Umur : 57 Tahun
4. Pekerjaan : Koordinator PPL
5. Pendidikan : S1

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Jawab: setau saya selaku penyuluh pertanian lapangan di tempat ini bahwasanya pemerintah desa sudah membuat peraturan yang dimana kelompok tani melakukan pertemuan tiap bulannya di rumah salah satu anggota kelompok tani

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Jawab: Selaku ketua penyuluh pertanian lapangan (PPL) kecamatan sipahutar dalam meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Kami dari pihak PPL pertama melakukan pemberian teori kepada masyarakat, setelah itu melakukan praktek ke lapangan. Ibu Lenta juga mengatakan bahwa dalam melakukan penyuluhan lapangan memiliki jadwal tertentu di setiap kelompok tani yang ada di Sipahutar, tetapi ada kesusunya ketika kelompok tani memiliki permintaan kesus kepada pihak PPL untuk melakukan penyuluhan maka PPL akan melaksanakannya, masalah kunjungan lapangan kami sudah memiliki jadwal tertentu, kadang kami juga melakukan pendampingan apabila masyarakat itu meminta untuk melakukan kunjungan lapangan

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat

begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I ?

Jawab : selaku bagian dari dinas pertanian di kecamatan sipahutar kami berupaya untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti halnya kami bekerja dengan pemerintah daerah supaya pihak pemerintah daerah memberikan alat pertanian kepada kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I ini, alat seperti 1 unit hand traktor sudah diberikan kepada masyarakat, ini dapat memperingan pekerjaan petani

Identitas responden V (informan utama)

1. Nama : Manganatap Simanjuntak
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Umur : 46 Tahun
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Jawab : sejauh ini kelompok tani yang ada di desa ini bisa berjalan dengan baik dan setiap anggota selalu disiplin untuk melakukan pertemuan tiap akhir bulannya, mungkin di karena adanya peraturan dari pemerintah desa tersebut

Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani?

Jawab: sebagai ketua kelompok tani yang saya ketahui bahwa tugas dari Penyuluhan Pertaian Lapangan (PPL) itu tugasnya untuk memberikan penyuluhan melakukan pelatihan dan kunjungan lapangan kepada masyarakat dan memberikan pelatihan pada masyarakat. Tetapi yang saya alami selama saya menjadi ketua kelompok tani, memang penyuluhan itu dilakukan oleh pihak PPL tetapi menurut saya itu hanya sekedar saja, sehingga anggota kelompok tani kurang mengikuti kegiatan yang buat oleh pihak PPL, masalah pendampingan oleh PPL

belum pernah kami rasakan pada kelompok tani ini

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I ?

Jawab : beberapa tahun ini saya sebagai ketua kelompok tani cukup merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa yang ada di tempat ini, yang dimana pemerintah menyisihkan sebagian dari anggaran itu untuk keperluan petani, seperti yang saya terima beberapa waktu yang lalu, selain itu juga pendistribusian pupuk dari pemerintah daerah yang di bagikan pada kelompok tani juga cukup baik, yang dimana di terima setiap 2 kali dalam setahun, pihak PPL juga berupaya memberikan fasilitas seperti hand traktor dan alat penanam bibit jagung, hal ini dapat membantu petani di Desa ini

Identitas responden VI (informan tambahan)

1. Nama : Rusmaudur Simare-mare
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Umur : 55 Tahun
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA

Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

1. Peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar?

Jawab: peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa itu ada dan berjalan dengan baik, yang dimana sampai sekarang kami melakukan pertemuan setiap akhir bulannya, tepat pada pukul 18.00 wib disitu juga kami melakukan undian, hal ini sangat berpengaruh pada setiap kedisiplinan anggota

Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial masyarakat.

1. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani?

Jawab : saya sebagai petani tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dibuat oleh pihak Penyuluh Pertanian Lapangan, karena terkadang saya tidak tahu informasi bahwasanya dilaksanakan kegiatan penyuluhan, kegiatan itu di informasikan melalui wa grup yang sudah dibuat oleh desa, tetapi ga semua warga desa ini memiliki *Hand Phone* android seperti saya sendiri. Lebih baik di informasikan secara langsung, tetapi saya pernah mendengar dari masyarakat bahwasanya ada kegiatan penyuluhan dilakukan tetapi kegiatan ini tidak banyak dihadiri oleh masyarakat, ujar ibu tersebut

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah.

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa pada kelompok tani dalam pemberdyaan kelompok tani yang ada di Desa Sabungan Nihuta I ?

Jawab: benar saya sebagai petani sudah menerima bantuan berupa pupuk maupun bibit jagung yang diberikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah dan saya pribadi merasa terbantu oleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, walaupun bantuanpupuk ini masih kurang banyak didistribusikan pada petani karena luas pertanian yang ada di desa ini cukup luas , terkait dengan handtraktor yang diberikan pemerintah juga baik di berikan pada kelompok tani, tapi lebih baiknya lagi jika unit hand traktornya di tambahkan lagi oleh pemerintah dilihat dari luas lahan yang di miliki oleh masyarakat petani desa ini

Lampiran VI Dokumentasi



Dokumentasi Kantor Pemerintah Desa Sabungon Nihuta I



Dokumentasi Lahan dan Petani Nenas



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bidang Kasi Pemerintah Desa Sabungan Nihuta I



Dokumentasi Bersama Kepala Desa Dan Staff Pemerintah Desa Sabungan Nihuta I



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Sipahutar



Dokumentasi Bersama Bapak Ketua Kelompok Tani Desa Sabungan Nihuta I



**Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Petani Nenas Desa
Sabungan Nihuta I**